

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Kamis 14 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Rp100M Anggaran Jalan Stadion Jadi Silpa

Rp100 M Anggaran Jalan Stadion Jadi Silpa

MAKASSAR, FAJAR — Harapan masyarakat Makassar untuk menyaksikan pembangunan Stadion Sudiang yang dijanjikan presiden sebelumnya, Jokowi, kini harus tertunda. Pemkot Makassar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD Perubahan 2024, untuk mendukung infrastruktur jalan di kawasan stadion tersebut. Namun anggaran pembangunan stadion ini ternyata tidak masuk dalam draft APBN Perubahan 2024. Kabar mengejutkan ini disam-

🔗 [Baca Rp100 M... Hlm 11](#)

Rp100 M Anggaran Jalan Stadion Jadi Silpa

🔗 [Lanjutan Halaman... 9](#)

paikan oleh Andi Iwan Aras (AIA), Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Lantaran tidak ada kepastian dari pemerintah pusat, maka Pemkot Makassar pun terpaksa menunda rencana pembangunan infrastruktur jalan di area Stadion Sudiang. Namun tetap disiapkan untuk tahun depan.

Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyatakan, anggaran tersebut tetap akan dianggarkan tetapi belum bisa digunakan selama belum ada kepastian dari peme-

rintah pusat atau Pemprov Sulsel terkait pembangunan stadion.

"Kami standby-kan anggaran ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti tiba-tiba ada kejelasan, kami sudah siap. Namun jika tidak ada kepastian, anggaran ini terpaksa menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," ujar Zulkifli, Rabu, 13 November.

Pembangunan Stadion Sudiang sebenarnya merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar. Berdasarkan kesepakatan awal, Kementerian

PUPR akan membangun stadion, Pemprov Sulsel menyediakan lahan, dan Pemkot Makassar berperan menyediakan infrastruktur jalan penunjang.

Dengan absennya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seluruh rencana ini tergantung pada keputusan di tingkat pusat dan provinsi. Meski belum ada kepastian, Pemkot Makassar menunjukkan komitmen serius dengan tetap menyisipkan anggaran jalan stadion dalam rancangan APBD Pokok 2025 yang diserahkan ke DPRD Makassar.

Alokasi ini akan kembali dibahas oleh Pemkot dan DPRD sebelum APBD 2025 disahkan. Keputusan tetap di tangan pemerintah pusat dan provinsi.

Pemkot Makassar pun mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel demi memperoleh kepastian proyek ini. "Harus ada pernyataan tertulis dari Kementerian PUPR atau Pemprov Sulsel bahwa proyek ini tidak bisa dilaksanakan tahun depan," tegas Zulkifli. **(mum/yuk)**